

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBIJAKAN PENINGKATAN  
PRODUKSI PERTANIAN PADI MENUJU SIDENRENG RAPPANG  
SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS**

Disusun dan diajukan oleh

**MOHD. RISWAN BIN JAMAL**

**E11116001**



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDUN  
MAKASSAR  
2021**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBIJAKAN PENINGKATAN  
PRODUKSI PERTANIAN PADI MENUJU SIDENRENG RAPPANG  
SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu  
Politik pada Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin

**MOHD. RISWAN BIN JAMAL**

**E11116001**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDUN  
MAKASSAR**

**2021**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBIJAKAN PENINGKATAN  
PRODUKSI PERTANIAN PADI MENUJU SIDENRENG RAPPANG  
SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS**

Disusun dan diajukan oleh  
**MOHD. RISWAN BIN JAMAL**  
**E11116001**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sajana Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada tanggal 03 Mei 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

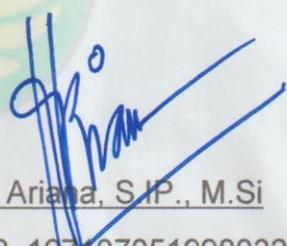
Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si

NIP. 197109171997031001

  
Dr. Ariana, S.IP., M.Si

NIP. 197107051998032002

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D.

NIP. 196212311990031023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBIJAKAN PENINGKATAN  
PRODUKSI PERTANIAN PADI MENUJU SIDENRENG RAPPANG  
SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS**

Disusun dan diajukan oleh:

**Mohd. Riswan Bin Jamal**

**E11116001**

Dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi

Pada Program Studi Ilmu Politik

Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Makassar, 27 Mei 2021

Menyetujui,

Panitia Ujian

Ketua	: Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si	(.....)
Sekretaris	: Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si	(.....)
Anggota	: Dr. Phil. Sukri, M.Si	(.....)
Anggota	: Sakinah Nadir, S.IP., M.Si	(.....)
Pembimbing 1	: Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si	(.....)
Pembimbing 2	: Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si	(.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohd. Riswan Bin Jamal  
NIM : E11116001  
Program Studi : Ilmu Politik  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**Peran Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Peningkatan Produksi**

**Pertanian Padi menuju Sidenreng Rappang sebagai Pusat Agribisnis**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 06 Maret 2021

Yang menyatakan



Mohd. Riswan Bin Jamal

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim...*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Peran Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Peningkatan Produksi Pertanian Padi menuju Sidenreng Rappang sebagai Pusat Agribisnis**". Salam dan salawat tentunya penulis curahkan kepada Baginda Rasulullah SAW sebagai nabi yang menjadi surih tauladan bagi umat Islam.

Skripsi ini penulis ajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar. Tidak hanya itu penulis berharap dengan skripsi ini dapat mendatangkan kebermanfaatannya dan menambah pengetahuan.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis selalu berusaha mempersembahkan karya terbaik dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan. Selain itu, penulis dalam penyusunan skripsi, tidak dapat dipungkiri berbagai hambatan dan tantangan yang ditemukan, akan tetapi dengan semangat dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi tersebut.

Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, yakni Bapak Jamal dan Ibu Hj. Hastati yang telah merawat, membesarkan dan mendidik penulis sampai saat ini. Sungguh tidak dapat penulis bandingkan betapa besarnya pengorbanan yang telah engkau berikan kepada anakmu. Penulis berdoa dan berjanji agar membahagiakan mereka berdua, meskipun penulis mengetahui tidak mampu membalas cinta mereka. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga inti dan keluarga besar atas

motivasi yang selalu diberikan dalam proses penyelesaian pendidikan Sarjana Ilmu Politik (S.IP).

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru yang saya banggakan dan cintai atas segala jasa dalam mendidik sehingga penulis sampai ke tahap ini. Terkhusus kepada Ibu Hj. Hasnawati selaku Guru SMAN 3 Sidrap, penulis sangat bersyukur dan senang dapat mengenal beliau, bahkan penulis telah menganggap Beliau layaknya sebagai orang tua kedua. Beliau bukan hanya mendidik kami, namun lebih dari itu yang diberikan. Sesungguhnya penulis belum mampu membalas segala jasa kebaikan Ibu, tapi penulis selalu mendoakan dan berjanji akan membalas segala kebaikan-kebaikan tersebut.

Tidak luput juga penulis menyadari bahwa berbagai pihak telah memberikan petunjuk dan bantuan bagi penulis dalam menyelesaikan studi. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada segenap pihak, antara lain:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin. Tidak luput juga ucapan terima kasih atas kesempatan mewakili Universitas Hasanuddin dalam kegiatan-kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional dan forum-forum kepemimpinan. Rasa bangga dan senang tiap kali mengenakan almamater tercinta dalam setiap aktivitas akademik dan *event* (Lomba, Forum dan Organisasi).
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, selaku Wakil Dekan I FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan akademik.
4. Bapak Dr. Suparman Abdullah, M.Si selaku wakil Dekan II FISIP UNHAS yang telah memberikan banyak kemudahan bagi penulis dalam urusan-urusan administrasi.
5. Bapak Dr. Hasrullah, M.Si selaku Wakil Dekan III FISIP UNHAS yang telah memberikan banyak kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan kemahasiswaan.
6. Bapak Andi Yakub, M.Si., Ph.D selaku Ketua Prodi Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik di Program Studi Ilmu Politik.
7. Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si. selaku pembimbing pertama dan Ibunda Dr. Ariana, M.Si. selaku pembimbing kedua, penulis banyak-banyak mengucapkan terima kasih selama proses bimbingan dan ilmu yang telah diberikan, semoga bernilai ibadah dan diberikan kesehatan dalam setiap aktivitas
8. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : Bapak Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, MA (Alm), Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag, Bapak Drs. A. Yakub, M.Si, Bapak Dr. Muhammad Saad, MA, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus, M.Si, Bapak Imran, S.IP, M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Kakak Ummi Suci Fathya Bailusy, M.Si, Kakak Zulhajar, S.IP, M.Si, dan Kakak Dian Ekawati S.IP, M.Si yang telah memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
9. Seluruh pegawai dan staf Departemen Ilmu Politik, khususnya Bapak Aditya, Ibu Hasna dan Bapak Hamzah yang senantiasa membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik.

10. Kepada seluruh informan atas kesediaannya menyisihkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara terkait data-data yang penulis butuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini terutamanya para pejabat di lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Bapak Palembang Masnyur Komisi II DPRD, Ketua HKTI Pemuda Tani Sidrap serta kelompok tani.
11. Kepada UKM Keilmuan dan Penalaran Ilmiah (KPI) Universitas Hasanuddin, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah menjadi rumah yang menyenangkan dan selalu dirindukan. UKM KPI Unhas yang menjadi saksi dalam kehidupan sebagai mahasiswa dan senang dapat mewakili lembaga ini dalam setiap kegiatan. Selain itu, kepada keluarga besar UKM KPI Unhas bahwa penulis bangga karena dapat mengenal orang-orang baik dengan visi hidup yang luar biasa.
12. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan dalam kepengurusan UKM KPI Unhas 2019, yakni Kabinet Semangat Bersatu. Penulis sangat bersyukur dan berterima kasih karena selalu memberikan motivasi dalam setiap langkah. Terkhusus kepada sahabat saya, Muh. Amri Arfah, Vitgar Membalik, A. Kahfi, A. Khusnul Fatimah, Nining, Isna, Cidah, Bob, Putri, dan lainnya. Semoga kelak kita semua dipertemukan dalam bingkai kekeluargaan dan impian yang telah menjadi nyata.
13. Kepada Ikatan Keluarga Mahasiswa Bidikmisi (IKAB) Universitas Hasanuddin, penulis ucapkan rasa senang dan bersyukur dipertemukan dengan orang-orang baik dan peduli terhadap sesama. Organisasi yang juga selalu dirindukan nantinya.
14. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan program Studi Ilmu Politik 2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kalian hebat dan luar biasa, semoga kelak kita bertemu dengan peran masing-masing yang kita cita-citakan.

15. Kepada lembaga Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) Fisip Unhas. Terima kasih telah memberikan ruang dan pengetahuan dalam pengembangan diri sebagai mahasiswa ilmu politik.
16. Kepada sahabat-sahabat saya yang sudah seperti saudara yakni Riski Iswatum Mu'Si, Erwin dan Fardi. Terima kasih atas segala motivasi dan semangat yang diberikan. Susah senang kita bersama dalam meraih kesuksesan. Semoga kelak kita dipertemukan dengan peran strategis dalam membangun Indonesia maju.

Makassar, 01 Maret 2021

Mohd. Riswan Bin Jamal

## ABSTRAK

**MOHD. RISWAN BIN JAMAL, E11116001, ILMU POLITIK, Peran Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Peningkatan Produksi Pertanian Padi menuju Sidenreng Rappang sebagai Pusat Agribisnis. Pembimbing Prof. Dr. Muhammad, M.Si., dan Dr. Ariana, M.Si.**

Penelitian ini membahas tentang peran pemerintah daerah dalam kebijakan peningkatan produksi pertanian padi menuju Sidenreng Rappang sebagai pusat agribisnis. Namun, kebijakan peningkatan produksi pertanian padi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2017-2019) masih saja mengalami penurunan produksi dan pendapatan yang dipengaruhi oleh berbagai hambatan. Padahal Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan daerah lumbung pangan padi dan telah menjadi visi RPJMD 2018-2023 sebagai pusat agribisnis. Sehingga peneliti bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam kebijakan peningkatan produksi pertanian padi menuju Sidenreng Rappang sebagai pusat agribisnis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kebijakan pertanian, teori implementasi kebijakan dan teori peran. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian deskriptif dan jenis penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, studi pustaka dan dokumentasi sebagai pendukung informasi, kemudian data tersebut dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya peran pemerintah daerah dalam kebijakan peningkatan produksi pertanian padi dilakukan dengan menggunakan dua peran. Peran tersebut yaitu peran aktif pemerintah daerah berupa program perbenihan dan perlindungan serta produksi tanaman pangan, dan program penyuluhan dan kelembagaan. Sedangkan peran partisipatif berupa program penyediaan sarana dan prasarana seperti jaringan irigasi, jalan tani, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin tani, dan program *tudang sipulung*. Dilihat dari peran aktif dan partisipatif pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan peningkatan produksi pertanian padi ternyata belum memberikan pengaruh signifikan bagi masyarakat dan daerah menuju Sidenreng Rappang sebagai pusat agribisnis

**Kata kunci :** *Kebijakan Prouduksi Pertanian Padi, Peran Pemerintah Daerah, Sidenreng Rappang.*

## ABSTRACT

**MOHD. RISWAN BIN JAMAL, E11116001, POLITICAL SCIENCE, The Role of Local Government in Increasing Rice Production Policies toward Sidenreng Rappang as An Agribusiness Center. The Supervisor, Prof. Dr. Muhammad, M.Si., dan Dr. Ariana, M.Si.**

This research is about the role of local government in increasing rice production policies toward Sidenreng Rappang as an agribusiness center. However, the policy of increasing rice production in the last three years (2017-2019) is still falling in production and incomes affected by obstructions. Whereas, Sidenreng Rappang is rice granaries area and has become RPJM's vision in 2018-2023 as an agribusiness center. Therefore, this research aims to know the role of local governments in increasing rice production policies toward Sidenreng Rappang as an agribusiness center. This research uses agricultural policy theory, policy implementation theory, and role theory. This research using descriptive and qualitative methods with in-depth interviews for data collection, observations, literature study, and documentation as that supports information, and then the data is analyzed. The result of this research suggests that the role of local governments in the policy of increasing rice production is carried out by two roles. The first is the active role of local governments in programs of crops immersion, protection, production, elucidation and institutional. The second is the participative role in provision of facilities such as irrigation, agricultural roads, fertilizer, pesticides, and farming tools. In addition, there is also a program names *Tudang Sipulung*. According to the role of active and participative local governments in the implementation policy to increase rice production, it has not yet had a significant impact on community toward Sidenreng Rappang as an agribusiness center.

**Keywords:** *Rice Farming Production Policies, The Role of Local Governments, Sidenreng Rappang.*

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
<b>2.1 Perspektif Politik Pertanian (Kebijakan Pertanian)</b> .....	<b>6</b>
<b>2.2 Kebijakan Publik</b> .....	<b>8</b>
<b>2.2.1 Teori Implementasi Kebijakan</b> .....	<b>10</b>
<b>2.3 Peran Pemerintah Daerah</b> .....	<b>12</b>
<b>2.4 Konsep Agribisnis</b> .....	<b>17</b>
<b>2.5 Telaah Pustaka</b> .....	<b>18</b>
<b>2.6 Kerangka Berfikir</b> .....	<b>21</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>23</b>
<b>3.1 Tipe dan Jenis Penelitian</b> .....	<b>23</b>
<b>3.2 Lokasi Penelitian</b> .....	<b>23</b>
<b>3.3 Sumber Data Penelitian</b> .....	<b>24</b>

3.4 Informan Penelitian.....	24
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.6 Teknik Analisis Data.....	26
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
4.1 Kondisi Geografis, Administrasi dan Kondisi Topografi .....	27
4.2 Visi RPJMD Sidenreng Rappang 2018-2023.....	30
4.3 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 2018-2023 .....	32
4.4 Peran Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Peningkatan Produksi Pertanian Padi Menuju Sidenreng Rappang sebagai Pusat Agribisnis .....	36
4.4.1 Peran Aktif Pemerintah Daerah.....	37
4.4.2 Peran Partisipatif Pemerintah Daerah .....	42
4.5 Pengaruh dari Peran Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan Peningkatan Produksi Pertanian Padi di Sidenreng Rappang.....	45
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>53</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1 Implementasi Kebijakan sebagai Proses Politik dan Administrasi.....</b>	<b>11</b>
<b>Gambar 2.2 Skema Kerangka Berfikir.....</b>	<b>22</b>
<b>Gambar 4.1 Peta Kabupaten Sidenreng Rappang.....</b>	<b>28</b>
<b>Gambar 4.2 Statistik Geografi Sidenreng Rappang.....</b>	<b>29</b>
<b>Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan .....</b>	<b>35</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang.....</b>	<b>29</b>
<b>Tabel 4.2 Pekerjaan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang.....</b>	<b>30</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Provinsi Sulawesi Selatan sendiri dalam bidang pertanian padi diketahui sebagai lumbung pangan di kawasan timur Indonesia dan memberikan kontribusi besar secara nasional. Dengan adanya potensi yang menjadi keutamaan dalam kebijakan pertanian, maka pemerintah memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat melalui kebijakan atau program pembangunan pertanian. Program tersebut berorientasi pada kebijakan pertanian yang bertujuan untuk kepentingan umum.

Provinsi Sulawesi Selatan terdapat salah satu daerah yakni Kabupaten Sidenreng Rappang yang dikenal sebagai daerah Lumbung Pangan Nasional dan sentral konteslasi wilayah penghasil komoditas pangan.<sup>1</sup> Daerah ini menjadikan pertanian sebagai sektor utama pendukung perekonomian masyarakat setempat. Di mana terdiri dari 11 kecamatan dengan komoditi potensi unggulan diantaranya padi sawah, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai dan kacang hijau.<sup>2</sup> Dari potensi unggulan pertanian tersebut, mayoritas didominasi pertanian padi. Sehingga daerah ini memiliki peluang sebagai pusat pengembangan agribisnis nasional yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan dan perekonomian melalui pembangunan pertanian.

Apalagi pemerintah daerah telah memiliki komitmen menjadikan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pusat agribisnis.<sup>3</sup> Hal tersebut

---

<sup>1</sup> Yasir, Muhammad, dkk. 2017. *Kontribusi Sektor Unggulan Tanaman Pangan terhadap Peningkatan Ekonomi Wilayah di Kecamatan Watang Sidenreng*. UIN Alauddin Makassar. Volume 6, No.1.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup>Ronalyw. 2019. *Tonggak Jadikan Sidrap Pusat Agribisnis*. Diakses melalui laman <http://www.co.id/berita/2019/02/18/tonggak-jadikan-sidrap-pusat-agribisnis-modern/> . Pada Tanggal 26 Februari 2020. Pukul 19.00 WITA.

berdasar atas hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sidenreng Rappang tahun 2018-2023. Di mana program-program tersebut bermuara pada visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023, yakni “Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”.<sup>4</sup> Hal ini kemudian menjadi landasan yuridis yang dirumuskan sebagai Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 tentang RPMJD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023 tersebut, maka pemerintah daerah memiliki kebijakan utama di bidang pertanian. Kebijakan pemerintah ini bertujuan untuk mewujudkan Sidenreng Rappang sebagai Pusat Agribisnis. Sebagaimana visi dari RPJMD tersebut. Sehingga peran pemerintah sangat diharapkan oleh masyarakat dalam merealisasikan kebijakan tersebut.

Namun saat ini, berdasarkan hasil pengamatan dan didukung oleh beberapa informasi bahwa berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya memajukan pertanian padi untuk menjadikan Sidenreng Rappang sebagai pusat pengembangan agribisnis. Tantangan yang hadir yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), teknologi, infrastruktur dan sebagainya yang perlu dioptimalisasikan sebagai pendukung pembangunan pertanian menuju pusat agribisnis melalui peran nyata dari pemerintah daerah.

Dari tantangan tersebut telah ditemukan permasalahan hampir tiap tahun terjadi berdasarkan observasi dan informasi yang diperoleh. Permasalahannya adalah kualitas produksi pertanian padi tidak menentu

---

<sup>4</sup> Pemerintah Kabupaten Sidrap.2019. *Pemerintah dan DPRD Sidrap Sepakati Rancangan Awal RPJMD 2018-2023*. Diakses Melalui Laman Pemerintah Kabupaten Sidrap [http://sidrapkab.go.id/site/index.php?/Berita/detail\\_berita/pemerintah-dan-dprd-sidrap-sepakati-rancangan-awal-rpjmd-2018-2023](http://sidrapkab.go.id/site/index.php?/Berita/detail_berita/pemerintah-dan-dprd-sidrap-sepakati-rancangan-awal-rpjmd-2018-2023) . Pada Tanggal 28 Februari 2020. Pukul 19.00 WITA.

yang dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan SDM, infrastruktur, cuaca, iklim, hama dan penyakit. Contohnya hama tikus yang menyerang tanaman padi masyarakat hingga mengakibatkan produksi petani berkurang. Bahkan masih ada kelompok tani yang lokasi sawahnya tadah hujan di Desa Kampale, Kecamatan Duapitue. Hal ini disebabkan pengelolaan sistem irigasi tidak merata dalam mendistribusikan air terhadap lahan-lahan dan kurangnya infrastruktur penunjang bagi petani. Selain itu, terletak pada kemampuan petani dalam pemanfaatan teknologi yang perlu dioptimalkan melalui upaya pengembangan pengetahuan keterampilan dan sikap sehingga mampu memacu peningkatan produksi. Tidak hanya itu, bencana alam seperti banjir dan kekeringan mengakibatkan petani terkadang mengalami kerugian dalam peningkatan produksi pertanian padi.

Permasalahan ini juga diperkuat dengan data yang diperoleh bahwa produksi pertanian padi dalam waktu 3 tahun terakhir mengalami penurunan produksi padi. Selama periode 2017-2019 produksi padi menurun sebesar 3,92 % yaitu dari 536.050,00 ton pada tahun 2018 menjadi 515,010,00 ton pada tahun 2019.<sup>5</sup> Penurunan produksi padi tersebut juga mengakibatkan peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Sidereng Rappang cenderung menurun selama 4 tahun terakhir. Hal ini terlihat dari tren kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Sidenreg Rappang yaitu dari 34, 33% tahun 2016 menjadi 29,80% tahun 2019.<sup>6</sup>

Melihat kondisi permasalahan di atas, sudah seharusnya peran pemerintah daerah hadir di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kebijakan pertanian padi dalam hal ini kebijakan peningkatan produksi padi di Sidenreg Rappang dapat terwujud sebagai pusat pengembangan agribisnis. Sebab hal tersebut telah menjadi fokus utama pemerintah

---

<sup>5</sup> Mustafa, Abdul Rahim. 2020. *Statistik Daerah Kabupaten Sidenreg Rappang*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreg Rappang.

<sup>6</sup> Ibid.

daerah yang saat ini tertuang dalam visi pembangunan Sidenreng Rappang 2018-2023.<sup>7</sup> Oleh Karena itu, dibutuhkan peran pemerintah daerah agar permasalahan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian padi dapat teratasi. Sehingga tujuan dari RPJMD Sidenreng Rappang dapat terwujud sebagai pusat agribisnis.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menganggap penting untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam sehingga dapat diketahui secara jelas tentang peran pemerintah dalam implementasi kebijakan peningkatan produksi pertanian padi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan demikian, penulis mengangkat penelitian yakni **“Peran Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Peningkatan Produksi Pertanian Padi Menuju Sidenreng Rappang sebagai Pusat Agribisnis”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus permasalahan adalah kebijakan peningkatan produksi pertanian padi yang mengalami kendala dan penurunan produksi padi di tahun 2017-2019. Padahal Pemerintah daerah memiliki visi RPJMD untuk mewujudkan Sidenreng Rappang sebagai pusat pengembangan agribisnis. Sehingga perlu untuk dilihat peran pemerintah daerah dalam kebijakan peningkatan produksi pertanian agar visi RPJMD sebagai pusat pengembangan agribisnis dapat terwujud di Kabupaten Sindereng Rappang.

Dari penjelasan di atas maka rumusan masalah yaitu bagaimana peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan peningkatan produksi pertanian padi menuju Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pusat agribisnis ?

---

<sup>7</sup>News.2019. Diakses melalui laman <https://katasunialsel.com/2019/01/03/visi-misi-bupati-dan-wabup-sidrap-cermin-harapan-rakyat-sidrap/>. Pada Tanggal 26 Februari 2020. Pukul 19.45 WITA.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka menjadi dasar peneliti menetapkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam kebijakan peningkatan produksi pertanian padi. Dari peran tersebut akan menggambarkan upaya pemerintah menuju Sidenreng Rappang sebagai pusat agribisnis

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi atas dua yaitu sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Akademis**

Manfaat penelitian ini secara akademis dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pengetahuan kepada pembaca agar dapat memahami peran pemerintah dalam kebijakan peningkatan produksi pertanian padi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya, dapat memberikan informasi kepada khalayak umum tentang peran pemerintah daerah menuju Sidenreng Rappang sebagai pusat agribisnis.

#### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian secara praktis diharapkan dapat dijadikan rekomendasi dalam perancangan pembangunan pertanian bagi pihak terkait. Kemudian, diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dampak positif bagi masyarakat dalam pembangunan pertanian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perspektif Politik Pertanian (Kebijakan Pertanian)

Penelitian ini berlandaskan pada perspektif politik pertanian yang merupakan salah satu bagian dalam kajian ilmu politik. Politik Pertanian terdiri atas dua terminologi yang masing-masing memiliki makna sederhana. Politik sendiri menurut Ramlan Surbakti adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.<sup>8</sup>

Pertanian dalam arti luas adalah segala kegiatan pertanian yang mencakup tanaman dan hewan ternak, sedangkan dalam arti sempit pertanian hanya mencakup pertanian sebagai budidaya penghasil tanaman pangan.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pertanian dalam arti sempit atau sederhana. Dengan memperhatikan kondisi geografis masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang didominasi sebagai petani yang bercocok tanam.

Politik pertanian merupakan sikap dan tindakan sektor publik dalam kehidupan pertanian untuk mencapai sasaran tertentu. Sektor publik yang dimaksud adalah pemerintah dalam kehidupan pertanian, meskipun sektor publik tidak selamanya pemerintah. Hal ini lebih dekat dengan istilah kebijakan pertanian sebagai terjemahan dari *Agricultural Policy* sehingga politik pertanian disebut juga dengan kebijakan pertanian.<sup>10</sup>

Kebijakan pertanian diatur oleh institusi pemerintahan dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat petani dan secara umum di wilayah tersebut. Petani sebagai sekelompok masyarakat juga memiliki

---

<sup>8</sup> Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta:PT Gramedia. Hlm. 10-11.

<sup>9</sup> Rahman. 2016. *Landasan Teori Sektor Pertanian*. Diakses Melalui Laman <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/532/05.3%20bab%203.pdf?sequence=10&isAllowed=y> . Pada Tanggal 15 Maret 2020. Pukul 20.30 WITA.

<sup>10</sup> Widodo, Sri. 2021. *Politik Pertanian*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Hlm. 28.

kepentingan untuk memajukan usahatani demi peningkatan kesejahteraan. Kebijakan tersebut dapat diturunkan melalui program-program atau kebijakan dalam mendukung sektor pertanian.

Konsep kebijakan pertanian yakni serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. sehingga tujuan umum dari kebijakan pertanian adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi naik dan akibatnya tingkat penghidupan dan kesejahteraan meningkat.<sup>11</sup> Lebih lanjut dijelaskan, terdapat enam ruang lingkup kebijakan pertanian yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan produksi
2. Kebijakan subsidi
3. Kebijakan investasi
4. Kebijakan harga
5. Kebijakan pemasaran
6. Kebijakan konsumsi.

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka kebijakan produksi pertanian menjadi target peneliti dalam kebijakan pertanian. Kebijakan produksi adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi pertanian. Kebijakan produksi pertanian yang dimaksud peneliti yaitu produksi pertanian padi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Karena luas wilayah pertanian didominasi oleh pertanian padi serta masalah yang dihadapi.

Oleh Karena itu, kebijakan peningkatan produksi pertanian padi harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan pertanian. Pemerintah daerah sebagai sektor publik memiliki peran dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan produksi pertanian padi. sehingga penulis, akan melihat

---

<sup>11</sup> Wulandari, Andi Tika. 2015. *Kerjasama Luar Negeri Kabupaten Bantaeng dengan Jepang di Bidang Pertanian*. Skripsi. FISIP. Universitas Hasanuddin. Hlm. 33.

seperti apa peran pemerintah dalam implementasi kebijakan peningkatan produksi pertanian padi menuju Sidenreng Rappang sebagai pusat agribisnis. sebab sejatinya pemerintah daerah memiliki peran nyata sebagai tanggungjawab utama yang tercantum sebagai visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

## **2.2 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan.<sup>12</sup>

Pelaku atau kelompok politik dalam hal ini yaitu pemerintah. Menurut Hoogerwet dalam Meriam Budiarto bahwa objek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Sehingga yang dimaksud kebijakan publik disini menurut Hoogewert ialah membangun masyarakat terarah melalui pemakaian kekuasaan.<sup>13</sup>

Kebijakan publik bagian dari peran pemerintah dalam melaksanakan aktivitasnya. Bahkan diperjelas menurut Woil sebagaimana dikutip Tangkilisan bahwa kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

Adapun tahapan proses pembuatan kebijakan menurut James E. Anderson dalam Rahmi adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

### **1. Identifikasi Masalah / *Agenda Setting***

---

<sup>12</sup> Budiarto, Meriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 20.

<sup>13</sup> Ibid. Hlm. 21

<sup>14</sup> Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset. Hlm. 2.

<sup>15</sup> Rahmi. 2018. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Industri Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bantaeng*. Skripsi. UIN Alauddin, Makassar. Hlm. 20.

Fokus pada tahapan ini adalah bagaimana masalah-masalah bisa dijadikan sebagai kebijakan public yang dispesifikasikan dan diidentifikasi mengapa hanya beberapa masalah dari semua yang ada, yang dapat menerima pertimbangan oleh pembuat kebijakan yang membutuhkan sebuah pemeriksaan dari agenda setting. Hal ini mengenai bagaimana badan-badan pemerintah memutuskan masalah apa yang layak. Apakah sebuah kebijakan public, mengapa hanya berapa? Keadaan/persoalan apa yang bisa menjadi masalah public? Bagaimana masalah bisa menjadi agenda pemerintah.

## 2. Formulasi Kebijakan

Hal ini meliputi berbagai macam tindakan berupa pembuatan dan pengidentifikasian, seringkali disebut pilihan untuk memecahkan atau memperbaiki masalah publik. Siapa yang ikut serta dalam perumusan kebijakan? Bagaimana pilihan untuk menghadapi sebuah masalah pembangunan? Adakah kesulitan dan penyimpangan dalam usulan perumusan kebijakan

## 3. Adopsi Kebijakan

Tahap ini memutuskan pilihan yang dimaksud termasuk tidak mengambil tindakan yang digunakan untuk mengatasi masalah. Bagaimana sebuah kebijakan diadopsi atau ditetapkan? Apa saja persyaratan harus dipenuhi? Apa isi dari kebijakan yang ditetapkan?

## 4. Implementasi/Pelaksanaan Kebijakan

Tahap ini, perhatian pada apa yang terselesaikan untuk melaksanakan atau menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan. Seringkali pembangunan lebih lanjut atau pengembangan kebijakan akan menjadi bagian dari pelaksanaan mereka. Siapa yang dilibatkan? Apa sesuatu hal sudah dilaksanakan sesuai kebijakan yang diselenggarakan? Bagaimana bentuk bantuan pelaksanaan atau menentukan isi dari kebijakan?

## 5. Evaluasi

Kegiatan ini memerlukan maksud untuk menentukan apakah sebuah kebijakan terpenuhi, apakah kebijakan tersebut memiliki akibat? Siapa yang dilibatkan? Siapa yang diuntungkan dan dirugikan oleh kebijakan? Apakah akibat dari evaluasi kebijakan? Apakah terdapat permasalahan baru yang teridentifikasi? Apakah proses kebijakan diulangi kembali karena evaluasi.

Dengan demikian, berdasarkan teori kebijakan dalam proses-proses kebijakan. Maka penulis ingin memfokuskan pada implementasi atau pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut untuk mendeskripsikan kebijakan peningkatan produksi pertanian padi yang sedang dilaksanakan pemerintah daerah melalui Visi RPJMD 2018-2023 dan diperjelas dalam peraturan daerah. Sehingga dapat diketahui sejauh mana peran pemerintah dibidang kebijakan peningkatan produksi pertanian padi dalam mewujudkan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pusat agribisnis.

### 2.2.1 Teori Implementasi/Pelaksanaan Kebijakan

Keberhasilan implementasi atau pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah ditentukan oleh beberapa faktor atau variable dan masing-masing variable saling berhubungan antara satu sama lain. Adapun teori implementasi kebijakan yang menjadi dasar bagi penulis dalam menganalisis yaitu melalui teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle.

Menurut Merilee S. Grindle bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan atau dipengaruhi dua faktor, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan mencakup:

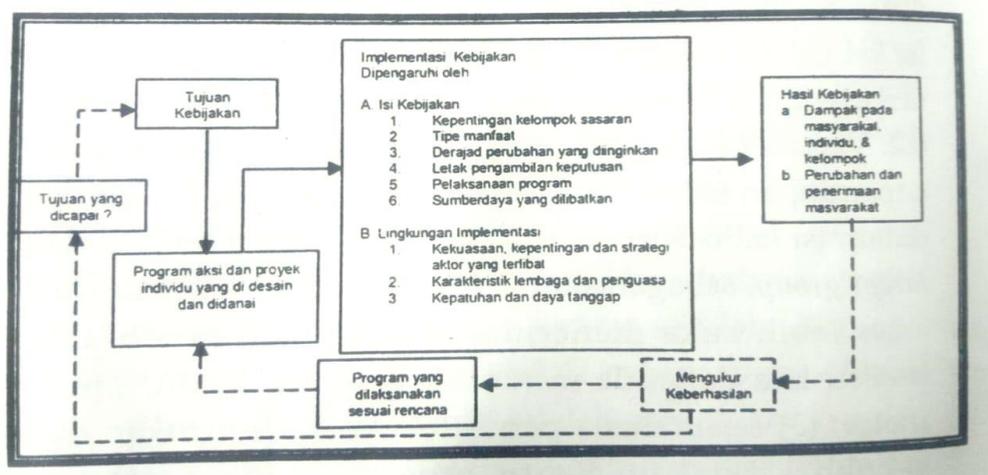
1. Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan
2. Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran

3. Sejuahmana perubahan yang diinginkan dari kebijakan
4. Kedudukan pembuat kebijakan. Harus jelas dimana letak pengambilan keputusan yang akan diimplementasikan.
5. Pelaksana program adalah actor dalam pelaksanaan siapa dan harus kompeten serta kapabel demi keberhasilan kebijakan
6. Sumber daya yang memadai, artiny harus didukung oleh sumber daya yang ada.

Sedangkan lingkungan kebijakan mencakup:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat.
2. Karakteristik institusi dan lembaga rezim yang sedang berkuasa
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

**Gambar 2.1 Implementasi Kebijakan sebagai Proses Politik dan Administrasi**



Sumber: Grindle, Merilee S, 1980:11.

Dari gambar diatas dapat difahami sebagai proses yang menjelaskan bagaimana teori implementasi kebijakan. Proses pertama dimulai dari tujuan kebijakan, setiap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah

pusat atau daerah telah memiliki tujuan kebijakan tersebut. jika tidak memiliki tujuan maka dianggap sia-sia saja. Setelah adanya tujuan kebijakan, maka kebijakan itu dituangkan dalam bentuk program aksi dan proyek individu yang didesain dan didanai. Dari sini dapat diamati bahwa apa yang menjadi penting dalam teori implementasi kebijakan, yaitu implementasi kebijakan yang berupa program dan proyek tersebut dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan dan lingkungan implementasi itu, saling bertemu dan terlibat serta memberikan pengaruh terhadap program yang dihasilkan. Setelah adanya program hasil kebijakan, maka selanjutnya adalah dampak kepada masyarakat atau individu dan perubahan yang diterima oleh penerima program hasil kebijakan. Proses terakhir adalah mengamati seluruh proses sebelumnya apakah program yang dihasilkan sesuai tujuan atau tidak. Tujuannya untuk mengetahui agar dapat mengukur keberhasilan program yang telah dilaksanakan dan dapat menyimpulkan hasil tujuan kebijakan.

### **2.3 Peran Pemerintah Daerah**

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Sosiologi Sebuah Pengantar, menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan seseorang dalam struktur sosial karena kedudukannya melakukan sesuatu atau gerak perubahan yang dinamis, dimana dari pola tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal atau peristiwa. Status dan kedudukan tidak dapat dipisahkan dengan peran tersebut. Sehingga setiap manusia memiliki peran sesuai dengan status dan kedudukannya di masyarakat. Peran dalam hal ini dibagi tiga jenis yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Soekanto, Soerjono. 1980. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali. Hlm. 243.

1. Peran Aktif

Peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik.

Melalui peran tersebut maka diharapkan dapat menjalankan fungsi-fungsi sesuai dengan status dan kedudukan. Dalam menjalankan peran terdapat beberapa dimensi peran. Adapun dimensi peran sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Peran sebagai kebijakan.

Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijakan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

2. Peran sebagai strategi

Penganut paham ini mengatakan bahwa peran adalah strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

3. Peran sebagai alat komunikasi

Peran didayagunakan sebagai instrmen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat. sehingga

---

<sup>17</sup> Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta: Walhi. Hlm. 67.

pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

4. Peran sebagai penyelesaian sengketa

Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan

5. Peran sebagai terapi.

Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Sedangkan pendapat dari Veithzal Rivai dalam Buku Kepemimpinan mengatakan peran merupakan perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Lebih lanjut Rivai mengaitkan peran sebagai tolak ukur kinerja seseorang. Peran dapat dijadikan tolak ukur seseorang sebagai pemimpin apakah orang itu dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya atau tidak.<sup>18</sup> Oleh sebab itu, Pemimpin yang dimaksud dalam menjalankan peran tersebut yakni salah satunya pemerintah.

Pemerintah (*Government*) secara etimologis berasal dari kata Yunani, *kubernan* dan nahkoda kapal. Artinya, menatap ke depan. Lalu “memerintah” berarti melihat kedepan, menentukan berbagai kebijakan

---

<sup>18</sup> Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 24

yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat-negara, mempekirakan arah perkembangan masyarakat pada masa akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan.<sup>19</sup>

Sedangkan Pemerintah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Dalam arti lain yaitu sekelompok orang yang bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Dengan begitu, kegiatan pemerintah lebih menyangkut pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan masyarakat-negara.<sup>20</sup>

Pemerintah dalam pelaksanaan sistem kenegaraan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penguasa yang bertugas yang melengkapi seluruh pemerintah daerah. Seperti presiden, wakil presiden yang dibantu para menteri-menteri. Sementara pemerintah daerah dalam pengertian tersebut juga adalah penguasa yang memerintah pemerintahan di daerah lewat otonomi daerah<sup>21</sup>.

Namun dalam konteks ini peneliti akan memfokuskan penjelasan pada Pemerintah daerah. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik

---

<sup>19</sup> Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta:PT Gramedia. Hlm. 167-168.

<sup>20</sup> Ibid. Hlm. 8.

<sup>21</sup> Pemerintah Kabupaten Sidrap.2020. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Diakses Melalui Laman Berita <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/27/120000669/hubungan-pemerintah-pusat-dan-daerah> . Pada Tanggal 17 Juli 2020. Pukul 14.30 WITA.

Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dari Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pemerintah daerah memiliki fungsi dalam menjalankan peran demi terselenggara jalannya pemerintahan. Adapun fungsi pemerintah daerah Undang-undang No. 23 Tahun 2014 adalah:

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Pemerintah daerah yang dimaksud peneliti yaitu tinjauan pemerintah daerah tingkat kabupaten. Pemerintah daerah kabupaten terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk kabupaten disebut wakil bupati. Jika dihubungkan peran dan pemerintah daerah kabupaten. Maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah memiliki tujuan utama untuk bertanggung jawab melindungi, menjamin dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan rencana pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Daerah didasarkan pada potensi daerah dengan melihat kondisi sosial, politik, budaya, ekonomi dan geografis. Di mana Rencana Pembangunan ini, peneliti maksudkan pada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Sidenreng Rappang 2019 -2023. Visi RPMD yaitu 'Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Aman, Adil dan Sejahtera'. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilihat terkait politik pertanian melalui peran pemerintah daerah.

Oleh sebab itu, Penelitian ini bermaksud melihat peran pemerintah daerah dalam kebijakan peningkatan produksi pertanian padi menuju Sidenreng Rappang sebagai daerah pusat agribisnis. Peran pemerintah daerah dalam hal ini yakni Bupati/Wakil Bupati atau Dinas Pertanian, dan perangkat kerja lainnya yang berupaya mewujudkan perencanaan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dua jenis peran, yakni peran aktif dan peran partisipasif pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan jenis-jenis peran yang telah dijabarkan dalam penjabaran di atas.

#### **2. 4 Konsep Agribisnis**

Pemerintah daerah berkomitmen menjadikan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pusat agribisnis yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penulisan ini, peneliti ingin memberikan penjelasan terkait potensi pertanian padi daerah yang menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki peluang sebagai pusat agribisnis. Oleh karena itu penting dalam memahami makna agribisnis yang dimaksud dalam penelitian tersebut.

Kabupaten Sidenreng Rappang adalah daerah lumbung pangan nasional yang memiliki potensi daerah di bidang pertanian. Terlihat komoditas utama yaitu padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang-

kacangan. Hal tersebut dibuktikan dari luas wilayah 1.883,25 Km<sup>2</sup> dan mayoritas masyarakat sebagai petani.<sup>22</sup> Akan tetapi didominasi oleh komoditas padi. Atas dasar tersebut potensi pertanian padi memainkan peranan penting dalam pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan melalui pembangunan pertanian menuju pusat agribisnis.

Agribisnis dalam arti sempit diartikan sebagai pemasaran hasil pertanian yang berusaha memaksimalkan keuntungan. Dalam arti luas menurut Gunawan dalam Arifin dan Biba bahwa agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mulai mata rantai produksi, pengelolaan dan pemasaran hasil yang ada hubungan dengan komoditi pertanian yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.<sup>23</sup>

## 2.5 Telaah Pustaka

Penelitian ini bertumpu pada tiga literatur yaitu dua skripsi dan satu jurnal. Telaah pustaka ini dapat memberikan gambaran kepada pembaca terkait ide, persamaan dan perbandingan terhadap penelitian. Berikut ini telaah pustaka yang peneliti lakukan.

Pada literatur pertama yaitu skripsi yang berjudul 'Politik Pertanian (Studi Tentang Implementasi Subsidi Pupuk di Kabupaten Ponorogo)'. Dalam skripsi ini membahas terkait politik pertanian dalam bidang kebijakan subsidi pupuk yang diberikan pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Seringkali dalam implementasi kebijakan terjadi permasalahan yaitu adanya kelangkaan pupuk bersubsidi padahal pemerintah telah memproduksi melebihi kuota yang telah ditetapkan. Sehingga perlu diketahui bagaimana tata niaga pupuk bersubsidi, kepentingan apa yang mempengaruhi kondisi tersebut. Adapun hasil penelitian dari skripsi ini

---

<sup>22</sup> Pemerintah Kabupaten Sidrap. 2014. *Potensi Wilayah Kabupaten Sidrap*. Diakses Melalui Laman Pemerintah [http://sidrapkab.go.id/site/index.php?/Potensi/detail\\_potensi/2](http://sidrapkab.go.id/site/index.php?/Potensi/detail_potensi/2) . Pada Tanggal 18 Juli 2020. Pukul 22.36 WITA.

<sup>23</sup> Arifin dan Biba, M.A. 2016. *Pengantar Agribisnis*. Bandung: Mujahid Press. Hlm. 14

bahwa terjadi penyelewengan pupuk bersubsidi untuk kepentingan tertentu dan lemahnya pengawasan bahkan pemerintah sulit menghadapi. Sehingga diperlukan kerjasama antar lembaga terkait agar permasalahan dapat diselesaikan.

Selanjutnya, persamaan dari literatur skripsi dengan penelitian ini adalah membahas kebijakan pertanian sebagai bagian dari kajian ilmu politik. Selain itu, metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang berusaha memberikan penjelasan secara factual terhadap fenomena yang berlaku.

Kemudian hal yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dengan literature skripsi adalah fokus penelitian. Di mana dalam literature skripsi menjelaskan politik pertanian dalam bidang kebijakan pupuk subsidi di Kabupaten Ponorogo. Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan kebijakan pertanian dalam bidang kebijakan peningkatan produksi pertanian padi dalam mewujudkan Sidenreng Rappang sebagai pusat agribisnis.

Pada literature kedua yaitu skripsi yang berjudul 'Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sektor Pertanian di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto'. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa daerah di Kecamatan Rumbia memiliki potensi pertanian yang dapat mendukung perekonomian masyarakat jika dioptimalkan dengan baik. Sebab berbagai permasalahan berlaku diantaranya pemerintah daerah masih kurang memberikan perhatian dukungan sarana dan prasarana dan tidak optimalnya penyuluhan kepada masyarakat petani. Sehingga peran pemerintah sangat penting dalam mendukung potensi tersebut. Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan pemerintah daerah belum mengoptimalkan dalam menjalankan perannya.

Selanjutnya, persamaan dari literature skripsi dengan penelitian ini adalah kajian kebijakan pertanian dalam merealisasikan tugasnya di sektor

pertanian. Selain itu, tipe dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan metode kualitatif.

Kemudian perbedaan literatur skripsi dan penelitian ini yaitu literatur kedua hanya menjelaskan pokok permasalahan mengenai Sumber Daya Alam (SDA) pertanian di bidang Hortikultura seperti tanaman sayuran, tanaman buah, tanaman hias dan obat yang memiliki potensi perekonomian. Dengan fokus bahasan yaitu bagaimana peran pemerintah daerah di tingkat kecamatan. Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan pokok permasalahan tentang kebijakan pertanian dibidang kebijakan peningkatan produksi pertanian padi melalui peran pemerintah daerah.

Pada literature ketiga yaitu jurnal yang berjudul 'Peran Politik Pertanian dalam Pembangunan Pertanian Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Sektor Pertanian'. Dalam jurnal ini membahas terkait peran politik pertanian dari masa ke masa hingga masa kini dalam era industri 4.0. perkembangan tersebut terjadi berbagai macam persoalan pertanian. Peran Politik pertanian dalam kajian ini menjelaskan perlu segera melakukan penstabilan harga pangan murah dan memperbesar ekspor. Bagi petani harus dijamin akses air bersih, lahan dan permodalannya. Pertanian dalam menghadapi industry 4.0 menuntut pengembangan teknologi pertanian agar kedepannya memberikan dampak dan tantangan.

Selanjutnya, persamaan dari literature jurnal dengan penelitian ini adalah kajian kebijakan pertanian. Selain itu, tipe dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan metode kualitatif.

Kemudian, perbedaan literatur jurnal dan penelitian ini yaitu literatur ketiga mengambil fokus pada perkembangan politik pertanian dari masa ke masa dalam menghadapi industry 4.0. Mengambarkan secara terpusat kondisi politik pertanian tersebut dan tantangan yang akan dihadapi di setor pertanian. Sedangkan dalam penelitian ini menggambarkan terkait peran pemerintah daerah terkhusus kebijakan peningkatan produksi pertanian

padi dalam mewujudkan Sidenreng Rappang sebagai pusat agribisnis. Jadi tampak jelas penelitian ini mengkaji kebijakan pertanian.

## **2. 6 Kerangka Berfikir**

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi pembangunan di bidang pertanian terkhusus pertanian padi. Potensi ini menjadi keunggulan bagi sebuah daerah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Pertanian padi telah menjadi pekerjaan utama bagi hampir seluruh masyarakat setempat. Tentunya, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan potensi daerah dengan sebaik-sebaiknya melalui kebijakan pertanian padi demi kemaslahatan bersama. Akan tetapi terjadi permasalahan dalam sektor pertanian yaitu terjadinya berbagai kendala bagi petani dalam produksi pertanian padi dan ditambah lagi dalam waktu tiga tahun terakhir (2017-2019) mengalami penurunan produksi pertanian padi.

Pemerintah daerah bahkan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 tentang RPMJD Kabupaten Sidenreng Rappang 2019-2023 sebagai penjabaran dari visi pembangunan yaitu terwujudnya Sidenreng Rappang sebagai daerah pusat agribisnis. Dengan adanya visi pembangunan daerah yang dirumuskan oleh pemerintah daerah, maka menjadi tanggungjawab utama dalam merealisasikan pembangunan daerah tersebut. Dari Visi RPJMD tersebut jelas menggambarkan bahwa pembangunan daerah berfokus pada sektor pertanian padi menuju pusat agribisnis.

Berdasar atas permasalahan dalam peningkatan produksi pertanian padi yang mengalami kendala dan penurunan produksi pertanian padi tersebut. Ditambah lagi sejalan dengan potensi daerah dalam sektor pertanian padi dan telah menjadi visi pembangunan daerah menuju pusat agribisnis, maka tampak jelas bahwa pemerintah perlu menunjukkan perannya di masyarakat. Adapun peran pemerintah daerah yakni peran

aktif dan peran partisipatif dalam implementasi kebijakan peningkatan produksi pertanian padi menuju Sidenreng Rappang sebagai pusat agribisnis. Apakah pemerintah daerah mampu menjalankan peran tersebut dengan optimal atau sebaliknya. Sebab peran tersebut dipengaruhi oleh status dan kedudukan sebagai pemerintah yang wajib menjalankan amanat undang-undang atau kebijakan.

Terwujudnya Sidenreng Rappang sebagai pusat agribisnis di masa akan datang tidak terlepas dari peran utama pemerintah. Oleh karena itu peneliti berharap melalui penelitian ini kelak dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melihat sejauh mana pencapaian dalam upaya peningkatan produksi pertanian padi menuju Sidenreng Rappang sebagai pusat agribisnis.

**Gambar 2.2 Skema Kerangka Berfikir**

